



JPUA

Media Informasi dan Komunikasi Kepustakawanan

**Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga:
Media Informasi dan Komunikasi Kepustakawanan**
<https://e-journal.unair.ac.id/JPERPUS>

**THE ROLE OF INFORMATION WORKERS' SELF-
DETERMINATION IN ACCESS TO INFORMATION FOR THE
HEARING AND SPEECH-IMPAIRED**

**PERAN SELF-DETERMINATION PEKERJA INFORMASI
DALAM AKSES INFORMASI BAGI DISABILITAS RUNGU-
WICARA**

**Research Paper
Penelitian**

Adhi Kurniawan¹ , Rahmi² 

* Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Humaniora, Universitas Indonesia,
Kota Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

Background of Study: Inclusive access and services of information for persons with disabilities are an absolute necessity that must be provided by information institutions and supported by information workers and policies.

Purpose: To determine the background, perceptions, and efforts of information workers in various information institutions to create inclusive information access and services for people with disabilities.

Method: This study used a community-based learning approach with the self-determination theory method, which was deemed appropriate in exploring the background of information workers in providing inclusive access and services for people with disabilities, especially hearing and speech-impaired.

Findings: Information workers have a general awareness of providing information services and access to deaf-mute people with disabilities. In its development, motivation and institutional support play a major role in the success of ideas and concepts of inclusiveness in information access and services. However, it was also found that the initiative of information workers emerged before access and service policies were created.

Conclusion: Information workers hold vital roles in both creating support and policies for inclusive access and services for people with disabilities. The background and efforts that drive this inclusivity stem from the efforts and endeavors of information workers to understand, create, and implement inclusivity into concrete projections and relevant policies.

Keywords: self-determination, information workers, information access, deaf disability, digital inclusion

INFO ARTICLE

Received: 5 Juni 2025

Revised: 9 Oktober 2025

Accepted: 20 Oktober 2025

Published: 3 November 2025

Correspondence:

Name: Adhi Kurniawan

Email:

adhi.kurniawan41@ui.ac.id

How to cite this article:

Kurniawan, A., & Rahmi. (2025). The Role of Information Workers' Self-Determination in Access to Information for the Hearing and Speech-Impaired. *JPUA: Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga: Media Informasi Dan Komunikasi Kepustakawanan*, 15(2), 81–91. <https://doi.org/10.20473/jpu.v15i2.2025.80-91>



ABSTRAK

Latar Belakang: Akses dan layanan informasi yang inklusif untuk kelompok disabilitas merupakan upaya mutlak yang perlu disediakan lembaga informasi dan didukung oleh pekerja informasi serta kebijakan yang menyertainya.

Tujuan: Mengetahui latar belakang, persepsi, dan upaya pekerja informasi dalam berbagai macam lembaga informasi untuk menciptakan akses dan layanan informasi yang inklusif kepada kelompok disabilitas.

Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan community-based learning dengan metode self-determination theory yang dinilai sesuai dalam upaya penelusuran latar belakang pekerja informasi dalam memberikan akses dan layanan inklusif untuk kelompok disabilitas.

Temuan: Pekerja informasi memiliki kesadaran umum dalam memberikan layanan dan akses informasi kepada kelompok disabilitas tuna rungu-wicara. Dalam perkembangannya, motivasi dan dukungan institusi memiliki peran besar dalam kesuksesan ide dan gagasan inklusivitas akses informasi dan layanan. Namun, juga ditemukan bahwa inisiasi pekerja informasi lebih dahulu muncul sebelum kebijakan akses dan layanan diciptakan.

Kesimpulan: Pekerja informasi memiliki peran vital dalam menciptakan dukungan dan kebijakan akses dan layanan inklusif untuk kelompok disabilitas. Latar belakang dan upaya yang mendorong inklusivitas tersebut ditimbulkan dari upaya dan usaha pekerja informasi dalam memahami, menciptakan, dan mengimplementasi inklusivitas ke dalam proyeksi nyata dan kebijakan yang relevan.

Kata Kunci: *self-determination*, pekerja informasi, akses informasi, disabilitas rungu, inklusi digital

PENDAHULUAN

Akses informasi merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu, termasuk kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya untuk mewujudkan inklusivitas akses informasi bagi kelompok disabilitas mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan ini ditandai dengan adanya panduan resmi dari peraturan pemerintah serta peningkatan sarana dan prasarana yang bertujuan mendukung akses informasi yang ramah bagi kelompok disabilitas. Hal tersebut seperti yang termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Selain itu, landasan hukum tertinggi pada Undang-Undang seperti yang termuat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 24 Ayat 1 yang tertulis Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang aksesibel.

Kelompok disabilitas rungu-wicara merupakan salah satu dari berbagai jenis disabilitas karena hambatan fisik. Kelompok ini merupakan kelompok yang membutuhkan metode tersendiri dalam bentuk isyarat dalam menerima dan menyampaikan informasi. Meskipun telah diterbitkan berbagai regulasi dan disediakan dukungan infrastruktur, kelompok disabilitas, khususnya penyandang rungu-wicara, masih menghadapi tantangan besar dalam memperoleh akses informasi yang setara. Tantangan tersebut dapat berupa hambatan teknis dan mencakup persepsi masyarakat umum serta keterbatasan pemahaman komunikasi di kalangan pekerja informasi ([Arianto & Apsari, 2023](#)). Selain itu, implementasi peraturan pemerintah yang telah diterbitkan belum sepenuhnya dapat mengatasi kesenjangan akses informasi bagi kelompok disabilitas rungu-wicara. Kesenjangan ini berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial ([Listman dkk., 2024](#)).

Pekerja informasi didorong untuk adaptif terhadap kebijakan dan layanan inklusif akses informasi kepada kelompok disabilitas rungu-wicara. Namun, persepsi dan implementasinya terkadang mengalami kendala. Tantangan tersebut seperti penggunaan dan adaptasi bahasa isyarat, konvergensi pemberitaan umum menuju adaptasi bahasa isyarat, dan konten-konten informasi yang belum memiliki interpretasi bahasa isyarat. Hal tersebut yang menjadi tantangan sekaligus peluang sebagai upaya mewujudkan inklusivitas akses informasi kepada kelompok tersebut. Sebagai upaya memberikan perlindungan dan meningkatkan inklusivitas, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi dalam bentuk peraturan dan keputusan. Salah satu regulasi penting yang menjadi tonggak awal dalam memberikan perlindungan bagi kelompok disabilitas adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-undang ini menjadi dasar dalam memberikan dukungan ekonomi dan sosial bagi penyandang

disabilitas. Seiring berjalannya waktu, berbagai pembaruan dan pengembangan regulasi terus dilakukan oleh pemerintah guna memperkuat perlindungan dan inklusivitas bagi kelompok disabilitas.

Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana pekerja informasi dapat memahami dan mengimplementasikan kebijakan yang ada secara efektif. Pekerja informasi yang dimaksud meliputi pemangku kebijakan, pengelola informasi, serta pencipta konten yang berperan penting dalam memastikan akses informasi bagi kelompok disabilitas rungu-wicara. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi pekerja informasi terhadap akses dan layanan bagi kelompok disabilitas rungu-wicara. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji keterkaitan antara penciptaan informasi atau pengetahuan dengan kebijakan yang telah diterapkan serta implementasinya di lapangan. Dengan memahami persepsi pekerja informasi dan membandingkannya dengan pengalaman nyata yang dialami oleh komunitas disabilitas rungu-wicara, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan efektif dalam mendukung aksesibilitas informasi bagi kelompok tersebut. Tantangan tersebut yang juga berperan melahirkan persepsi dan stigma di kalangan masyarakat umum/ pekerja informasi terhadap kelompok disabilitas rungu-wicara ([Rosalina & Setiyowati, 2023](#)). Penelitian mengenai persepsi pekerja informasi terhadap akses informasi bagi penyandang disabilitas telah dibahas oleh berbagai peneliti.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai persepsi pekerja informasi terhadap akses dan layanan bagi kelompok disabilitas rungu-wicara mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman terhadap regulasi yang ada, penerapan kebijakan di lapangan, hingga faktor-faktor psikologis yang memengaruhi sikap. Agar pembahasan ini lebih sistematis, tinjauan pustaka ini akan dibagi menjadi tiga kelompok besar: Persepsi Pekerja Informasi, Regulasi Kebijakan, dan Teori *Self-Determination*.

Penelitian mengenai persepsi pekerja informasi terhadap akses informasi bagi penyandang disabilitas telah dibahas oleh berbagai peneliti. Menurut ([Azizah & Rahmi, 2023](#)), persepsi pustakawan sebagai pekerja informasi dapat memengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas. Pustakawan memiliki tanggung jawab dalam memastikan aksesibilitas informasi bagi seluruh pengguna ([Bodaghi dkk., 2019](#)), termasuk kelompok disabilitas rungu-wicara. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai berbagai faktor yang memengaruhi persepsi pekerja informasi, seperti regulasi, infrastruktur, dan profesionalitas dalam melayani pengguna.

Selain pustakawan, pekerja informasi juga mencakup pekerja media massa, kreator konten, dan penyedia layanan informasi lainnya. Masing-masing memiliki peran dalam menciptakan, mengorganisasi, dan menyebarkan informasi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Perbedaan motivasi, tekad, dan tujuan dari setiap pekerja informasi dapat memengaruhi bagaimana mereka mengimplementasikan kebijakan aksesibilitas. ([Page & Islam, 2015](#)) menunjukkan bahwa kepribadian pekerja informasi, seperti tingkat keterbukaan dan empati, dapat menjadi indikator penting dalam menentukan sejauh mana mereka memiliki sikap inklusif atau eksklusif terhadap penyandang disabilitas. Pekerja informasi dengan tingkat empati yang lebih tinggi cenderung memahami dan mengimplementasikan kebijakan aksesibilitas dengan lebih baik.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kepemimpinan dalam membangun budaya yang inklusif di lembaga informasi. Menurut ([Tracy-Bronson, 2024](#)), pemimpin yang memiliki kesadaran terhadap keadilan sosial dan isu disabilitas dapat berperan dalam mendorong pekerja informasi untuk lebih proaktif dalam memperjuangkan hak-hak kelompok disabilitas. Dengan demikian, persepsi pekerja informasi dipengaruhi oleh kepemimpinan dan kebijakan yang diterapkan dalam lembaga mereka.

Regulasi kebijakan merupakan komponen penting dalam upaya penyediaan akses informasi yang inklusif ([Rosalina & Setiyowati, 2023](#)). Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi landasan hukum yang memberikan jaminan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat juga telah menjadi dasar dalam memberikan dukungan sosial dan ekonomi bagi kelompok disabilitas.

Namun tantangan utama terletak pada bagaimana pekerja informasi memahami dan mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif. Penelitian ([Thomas dkk., 2023](#)) menunjukkan bahwa kebijakan yang efektif perlu mempertimbangkan berbagai faktor individu, termasuk kepribadian,

psikologi, dan motivasi pekerja informasi. Dengan demikian, evaluasi kebijakan yang mengintegrasikan pemahaman psikologis pekerja informasi dapat meningkatkan implementasi kebijakan yang lebih inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Community-Based Research* (CBR) karena relevan untuk menggali persepsi pekerja informasi serta implementasi kebijakan aksesibilitas bagi kelompok disabilitas rungu-wicara ([Shkedy dkk., 2021](#)). Pendekatan CBR dipilih karena bersifat kolaboratif. Selain itu, pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami relasi antara pekerja informasi dan kelompok disabilitas rungu-wicara yang menjadi subjek sekaligus mitra penelitian. Metode pendekatan CBR memberikan ruang partisipasi aktif bagi komunitas pekerja informasi untuk turut menentukan arah penelitian, menafsirkan hasil, dan merancang rekomendasi yang kontekstual. Hal ini penting karena isu akses informasi bagi penyandang disabilitas mencakup persoalan kebijakan dan pengalaman serta persepsi sosial yang hidup di komunitas ([Eide dkk., 2022](#)). Keterlibatan langsung komunitas disabilitas membantu menyeimbangkan posisi kuasa antara peneliti dan partisipan, memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan bias institusional. CBR juga memungkinkan proses *co-creation of knowledge* yaitu penciptaan pemahaman bersama antara peneliti, pekerja informasi, dan penyandang disabilitas sebagai mitra menjadi relevan. Pendekatan ini relevan untuk menganalisis dinamika empati, otonomi profesional, serta persepsi sosial yang mempengaruhi layanan inklusif—unsur yang menjadi inti dari *Self-Determination Theory* (SDT).

Prosedur pelaksanaan metode dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahap utama, yaitu *pre-field engagement*, pengumpulan data, analisis tematik, dan validasi hasil. Pada tahap *pre-field engagement*, peneliti membangun jejaring dan melakukan komunikasi awal dengan lembaga pekerja informasi dan komunitas disabilitas rungu-wicara untuk memastikan kesediaan berpartisipasi. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kelembagaan. Analisis data menggunakan pendekatan tematik dari Braun dan Clarke dalam ([Thomas dkk., 2023](#)) yang dilakukan secara berlapis. Pertama, dilakukan proses *open coding* terhadap transkrip wawancara dan catatan observasi untuk mengidentifikasi makna-makna kunci terkait motivasi, persepsi, dan praktik inklusif. Kedua, hasil *open coding* dikelompokkan menjadi *axial codes* yang mencerminkan tema awal, seperti inisiatif diri dari para pekerja, dukungan kelembagaan, dan hubungan dengan kelompok difabel. Ketiga, tema akhir disusun berdasarkan indikator SDT yaitu: 1) *autonomy*, 2) *competence*, dan 3) *relatedness* untuk melihat keterkaitannya dengan konteks kerja informan. Triangulasi dilakukan secara metodologis (antara wawancara, observasi, dan dokumen) serta secara sumber (antarjenis informan lintas lembaga). Validasi data dilakukan melalui *member checking*, yakni pengembalian ringkasan hasil wawancara kepada informan untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan pandangan partisipan ([Vera Nurfajriani dkk., 2024](#)). Prosedur ini memperkuat transparansi, kredibilitas, dan replikabilitas hasil penelitian.

Kriteria inklusi informan dalam penelitian ini ditetapkan dengan mempertimbangkan relevansi peran, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam isu akses informasi bagi penyandang disabilitas. Adapun kriteria pemilihan adalah sebagai berikut: (1) posisi profesional: individu yang bekerja sebagai pekerja informasi meliputi: pustakawan, jurnalis, kreator konten, pejabat humas, dan pengelola kebijakan publik di bidang informasi; (2) pengalaman kerja minimal tiga tahun di lembaga yang berkaitan dengan penciptaan atau pengelolaan informasi publik; (3) keterlibatan langsung dalam inisiatif, proyek, atau kebijakan yang berfokus pada akses informasi inklusif, terutama untuk penyandang disabilitas rungu-wicara; (4) afiliasi kelembagaan dan jaringan: memiliki posisi formal atau keanggotaan aktif dalam lembaga pemerintah, media massa, atau organisasi profesi yang memiliki mandat layanan publik; dan (5) keterbukaan komunikasi dan partisipasi aktif dalam proses wawancara dan diskusi reflektif sesuai prinsip CBR. Kriteria tersebut memastikan bahwa informan bukan hanya memahami konteks kerja mereka, tetapi juga memiliki pengalaman praktis yang mencerminkan prinsip-prinsip *autonomy*, *competence*, dan *relatedness* yang diteliti.

Tabel 1. Daftar Informan dalam Penelitian

No	Nama	Jabatan	Institusi	Masa Kerja
1	Mulyo Hadi (R1)	Komisioner	Komisi Penyiaran Indonesia	12 tahun
2	Eddy Prastyo (R2)	Pemimpin Redaksi Siber	Radio/Media Konvergensi	19 tahun
3	Agung Prasetya (R3)	Kasubdit Humas dan SOTK Perpustakaan	Kementerian Komunikasi	8 tahun
4	Abdul Wahid Aziz (R4)	Pustakawan	Perpustakaan Sekolah	10 tahun
5	Abdi Purmono (R5)	Kreator Konten	Situs Berita/Media Konvergensi	23 tahun
6	Vincentius Gitiyarko (R6)	Redaktur Pelaksana	TV/Media Konvergensi	7 tahun
7	Dian Inggrawati Soebangil (R7)	Badan Pengurus Informasi	Kementerian Sosial	11 tahun
8	Budi Raharjo (R8)	Pengurus Organisasi	LPP Televisi Republik Indonesia	30 tahun

Penerapan *Self-Determination Theory* (SDT) dalam penelitian ini berperan sebagai lensa konseptual untuk merancang instrumen wawancara dan kerangka analisis data. Indikator *autonomy* digunakan untuk menggali sejauh mana pekerja informasi memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan, menginisiasi program inklusi, dan menciptakan inovasi dalam akses informasi. Pertanyaan diarahkan pada bentuk otonomi profesional dan ruang pengambilan keputusan yang dimiliki. Indikator *competence* digunakan untuk menilai persepsi informan terhadap kemampuan mereka dalam melayani kelompok disabilitas rungu-wicara, termasuk pelatihan yang pernah diikuti, dukungan institusi, dan hambatan teknis yang dialami. Indikator *relatedness* menyoroti aspek relasi sosial dan empati. Hal yang disoroti juga termasuk pengalaman informan dalam membangun kolaborasi dengan komunitas disabilitas serta bagaimana hubungan tersebut memengaruhi motivasi para pekerja informasi. Pada tahap analisis, data wawancara dan observasi dipetakan ke dalam ketiga dimensi SDT untuk menilai pola motivasi intrinsik yang memengaruhi praktik inklusif. Proses pemetaan ini menghasilkan matriks tematik yang menghubungkan perilaku informan dengan struktur kelembagaan dan konteks sosialnya. Dengan demikian, metode penelitian dapat menggambarkan fenomena sosial dan menjelaskan dinamika motivasional yang menjadi dasar perilaku inklusif para pekerja informasi.

HASIL DAN DISKUSI

Pendekatan Humanistik Pemenuhan Hak Akses dan Informasi dari Pekerja Informasi untuk Kelompok Disabilitas Pendekatan *Community-Based Research* (CBR) dalam penelitian ini menjadi landasan konseptual dan metodologis yang menentukan arah keseluruhan proses penelitian. CBR menempatkan pekerja informasi sebagai objek penelitian dan mitra sejajar yang turut berperan dalam setiap tahap kegiatan yang relevan dengan dukungan kelompok disabilitas. Upaya tersebut mendampingi mulai dari perumusan masalah, proses pengumpulan data, hingga refleksi terhadap hasil. Dalam konteks penelitian ini, para pekerja informasi dianalisis bagaimana berinteraksi secara partisipatif bersama kelompok disabilitas rungu-wicara untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam akses informasi publik. Pendekatan ini digunakan untuk mengamati, menganalisis, dan mendapatkan informasi dan korelasi antara kebijakan yang tersedia dengan sikap dan dorongan individu atau lembaga kerja dalam menciptakan dukungan akses kepada kelompok disabilitas.

Keterpaduan antara CBR dan SDT dalam penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi intrinsik pekerja informasi bersifat komplementer dari konteks sosial yang mendukung partisipasi dan kolaborasi. Melalui interaksi langsung dengan komunitas rungu-wicara, pekerja informasi memahami bahwa inklusivitas bukan

sekadar kebijakan, melainkan tanggung jawab sosial yang lahir dari kesadaran bersama. Hal ini memperkuat gagasan bahwa CBR berfungsi sebagai pendekatan pengumpulan data dan peluang strategi pemberdayaan yang menumbuhkan kepemilikan kolektif terhadap perubahan sosial. Dengan cara ini, penelitian berkontribusi nyata terhadap praktik dan kebijakan yang lebih inklusif.

Penerapan CBR dalam penelitian ini membuktikan efektivitasnya dalam menghubungkan antara dimensi ilmiah dan aksi sosial. Pendekatan ini menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Merekatkan kesenjangan yang terjadi antara lembaga penyedia informasi dan kelompok disabilitas. Dengan memfasilitasi kolaborasi sejajar antara pekerja informasi dan kelompok disabilitas, CBR membantu menciptakan mekanisme penelitian yang etis, adaptif, dan berorientasi pada perubahan sosial. Oleh karena itu, bahasan penelitian ini menegaskan bahwa CBR dapat dimanfaatkan secara metodologis, posisi etis, dan epistemologis dalam upaya membangun riset yang berkeadilan sosial dan memberdayakan kelompok disabilitas.

Autonomy: Inisiatif dan Kebebasan dalam Aksi Informasi

Aspek *autonomy* didefinisikan sebagai kesadaran diri, dalam hal ini terlihat dari kemampuan pekerja informasi mengambil keputusan dan inisiatif dalam memperjuangkan kebijakan aksesibilitas. Responden seperti Eddy Prastyo (PRSSNI dan E100) menunjukkan otonomi tinggi ketika menginisiasi proyek berita dengan penerjemah bahasa isyarat sebelum adanya kewajiban regulatif. Mulyo Hadi Purnomo (KPI) memanfaatkan posisi regulatifnya untuk mengusulkan pedoman penyiaran yang ramah disabilitas. Sementara Agung Prasetya (Komdigi) belajar bahasa isyarat secara mandiri untuk meningkatkan interaksi dengan komunitas disabilitas. Ketiganya memperlihatkan dorongan otonomi yang lahir dari kesadaran sosial, bukan sekadar tuntutan institusional. Hal ini sejalan dengan prinsip SDT bahwa otonomi tumbuh ketika individu memiliki kebebasan bertindak sesuai nilai dan makna pribadi ([Lewis dkk., 2021](#)).

Aspek *autonomy* terlihat dari kemampuan pekerja informasi mengambil keputusan secara mandiri dan berinisiatif dalam memperjuangkan kebijakan aksesibilitas. Responden-responden yang teridentifikasi menerapkan aspek *autonomy* berupaya menciptakan praktik-praktik inovatif seperti penyediaan juru bahasa isyarat dalam siaran atau mengembangkan kanal informasi yang ramah difabel. Sehingga dorongan dari dalam diri tersebut juga berupaya menciptakan instruksi kelembagaan sesuai dengan kemampuan eksekutif yang dimiliki masing-masing responden. Tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa motivasi pekerja informasi lahir dari nilai personal dan rasa tanggung jawab sosial. *Autonomy* yang dilakukan tersebut mengindikasikan adanya kesadaran moral dan profesional untuk memastikan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi secara setara.

Kapasitas dan Kompetensi Kerja dalam Analisis Implementasi Indikator Competence

Aspek *competence* berkaitan dengan kemampuan teknis, keahlian profesional, dan rasa percaya diri pekerja informasi dalam mendukung layanan inklusif. Agung Prasetya menunjukkan kompetensi melalui pemanfaatan teknologi dan kemitraan dengan Gerkatin untuk mengembangkan pelatihan bahasa isyarat bagi ASN. Abdul Wahid Aziz memperlihatkan penerapan kompetensi praktis dengan menghadirkan inovasi perpustakaan inklusif di sekolah Muhammadiyah, yang menyediakan sarana pembelajaran adaptif bagi siswa difabel. Kedua contoh ini menegaskan bahwa kompetensi dibentuk oleh pelatihan formal dan pengalaman sosial yang memperkuat empati dan pemahaman terhadap kebutuhan pengguna. Temuan ini memperkuat pandangan mengenai *self-determination theory* bahwa kompetensi meningkat melalui pengalaman keberhasilan nyata yang diakui oleh lingkungan sosial ([Alzuguren, 2019](#)).

Tindakan identik *competence* tercermin dari upaya pekerja informasi dalam meningkatkan kapasitas profesional dan teknis guna mendukung aksesibilitas. Kompetensi diukur dari kemampuan menggunakan teknologi informasi, kepekaan sosial, empati, dan keterampilan komunikasi lintas kemampuan. Beberapa responden mengembangkan inisiatif pelatihan internal, belajar bahasa isyarat secara mandiri, dan berkolaborasi dengan komunitas Gerkatin untuk memahami kebutuhan pengguna disabilitas. Hal ini memperlihatkan bahwa kompetensi berkembang melalui pengalaman reflektif, kelembagaan informal, dan partisipasi langsung dengan komunitas.

Indikator Relatedness pada Relasi Sosial dan Empati terhadap Kelompok Disabilitas

Relatedness memperkuat pemahaman bahwa hubungan sosial yang empatik antara pekerja informasi dan komunitas disabilitas menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan layanan inklusif. Relasi sosial yang terjalin bersifat profesional, emosional, dan kolaboratif. Beberapa responden menyebutkan bahwa interaksi langsung dengan komunitas rungu-wicara membuka perspektif baru tentang kesetaraan. Sehingga hal tersebut mendorong perubahan sikap dalam praktik kerja sehari-hari. Melalui hubungan ini pekerja informasi menemukan makna sosial dalam pekerjaannya. Sehingga pada akhirnya memperkuat motivasi intrinsik dan komitmen jangka panjang terhadap nilai-nilai inklusivitas.

Aspek *relatedness* tercermin dari hubungan interpersonal dan empati pekerja informasi terhadap komunitas disabilitas. Abdi Purmono dari Tempo menekankan pentingnya narasi pemberitaan yang membangun kesetaraan sosial dan menghindari pandangan terhadap penyandang disabilitas. Abdul Wahid Aziz dan Agung Prasetya menunjukkan bagaimana hubungan sosial yang humanis dengan komunitas rungu-wicara menjadi dasar keberhasilan praktik pelayanan publik. Keterhubungan sosial ini memperkuat motivasi intrinsik pekerja informasi untuk berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan akses informasi inklusif, sejalan dengan semangat kolaboratif yang diusung oleh pendekatan CBR. Hal tersebut relevan fungsinya sebagai ruang dialog dan aksi bersama komunitas.

Analisis Dokumen dalam Triangulasi Penelitian

Para responden membagikan informasi dokumen dari sumber resmi lembaga pemerintah, organisasi profesi, serta komunitas keagamaan yang mendorong penciptaan akses dan dukungan kepada kelompok disabilitas. Hal ini dimanfaatkan sebagai upaya analisis dokumen untuk memperkuat dan memverifikasi temuan wawancara dan observasi, serta menelusuri keterkaitan antara kebijakan, pedoman etis, dan praktik lapangan dalam penyediaan akses informasi bagi kelompok disabilitas rungu-wicara.

Dokumen yang dianalisis terdiri atas empat kelompok besar. Pertama, kelompok dokumen regulasi pemerintah dan lembaga negara. Dokumen kelompok pertama seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, hingga Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 yang mengatur tata cara penghormatan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai kerangka hukum makro yang menjadi dasar legitimasi kebijakan akses informasi inklusif di Indonesia. Kelompok dokumen kementerian dan lembaga teknis seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2015 tentang kewajiban pelayanan universal telekomunikasi dan informatika, serta berbagai peraturan Menteri Sosial dan Menteri Pendidikan yang berkaitan dengan penyediaan akomodasi layak dan rehabilitasi sosial. Dokumen ini digunakan untuk memahami konteks implementatif dari kebijakan pemerintah dalam lingkup layanan informasi publik dan pendidikan inklusif.

Organisasi profesi dan lembaga media yang dilampirkan oleh responden menjadi kluster dokumen kelompok ketiga. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Ketetapan Musyawarah Nasional PRSSNI (Persatuan Radio Swasta Siaran Nasional Indonesia), serta Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan upaya normatif dan profesional dalam membangun standar etika dan praktik penyiaran yang memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas. Pada kelompok dokumen keempat berisi organisasi keagamaan dan lembaga advokasi, seperti Fiqih Difabel Muhammadiyah, Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas dari Nahdlatul Ulama, serta berbagai kertas kebijakan dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Republik Indonesia (PSHK). Dokumen-dokumen ini menunjukkan peran penting lembaga sosial dan keagamaan dalam membentuk wacana moral dan sosial tentang kesetaraan hak serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Tabel 2. Lampiran Salindai Dokumen Pendukung Penelitian yang dibagikan Responden

No	Judul Dokumen	Penerbit Dokumen
1	Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Pemerintah Republik Indonesia

2	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	Pemerintah Republik Indonesia
3	Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Pemerintah Republik Indonesia
4	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas	Pemerintah Republik Indonesia
5	Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Presiden Republik Indonesia
6	Risalah Resmi Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat ke-8 Tanggal 20 Oktober 2015	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
7	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pemerintah Republik Indonesia
8	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Pemerintah Republik Indonesia
9	Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran	Komisi Penyiaran Indonesia
10	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia
11	Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas	Kementerian Sosial
12	Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial	Kementerian Sosial
13	Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Kementerian Sosial
14	Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas	Kementerian Sosial
15	Keputusan Menteri Sosial Nomor 16/HUK/2021 tentang Tim Koordinasi Upaya Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Kementerian Sosial
16	Keputusan Menteri Sosial Nomor 59/HUK/2022 tentang Tim Koordinasi Nasional Upaya Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Kementerian Sosial
17	Menggapai Dunia Kerja Inklusif	Aliansi Jurnalis Independen
18	Meta Analisis Platform Media Digital Ramah Penyandang Disabilitas	Aliansi Jurnalis Independen

19	Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas	Aliansi Jurnalis Independen
20	Pedoman Aksesibilitas Konten Situs	Kompas Gramedia
21	Fikih Difabel Muhammadiyah	Muhammadiyah
22	Keputusan PP Muhammadiyah No 734 Tahun 2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI	Muhammadiyah
23	The Fikih Difabel of Muhammadiyah Essay	Muhammadiyah
24	Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas	Nahdlatul Ulama'
25	Ketetapan Musyawarah Nasional XVI PRSSNI 2023	Persatuan Radio Swasta Siaran Nasional Indonesia
26	Ketetapan Sidang Paripurna Pusat I 2023	Persatuan Radio Swasta Siaran Nasional Indonesia
27	Ketetapan Sidang Paripurna Pusat II 2024	Persatuan Radio Swasta Siaran Nasional Indonesia
28	Standar Profesional Radio Siaran	Persatuan Radio Swasta Siaran Nasional Indonesia
29	Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Republik Indonesia
30	Kertas Advokasi Kebijakan atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Kerangka Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Republik Indonesia
31	Kertas Kebijakan Penguatan Praktik Berdemokrasi dan Pelindungan Hak Asasi Manusia	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Republik Indonesia
32	Kertas Kebijakan Reformasi untuk Pendidikan yang Inklusif, Aksesibel, dan Berkeadilan	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Republik Indonesia
33	Laporan Studi Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Republik Indonesia
34	Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Usul DPR Tentang Penyandang Disabilitas	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Republik Indonesia
35	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
36	Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Mengatur Mengenai Penyandang Disabilitas	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
37	Peraturan Direksi TVRI Nomor 18 tahun 2022	LPP Televisi Republik Indonesia
38	Peraturan Direksi TVRI Nomor 21 tahun 2022	LPP Televisi Republik Indonesia
39	Rencana Strategis LPP TVRI Tahun 2015-2019	LPP Televisi Republik Indonesia
40	Rencana Strategis Pusat Pendidikan dan Pelatihan LPP TVRI Tahun 2020-2024	LPP Televisi Republik Indonesia

Sumber: Salindia dari responden penelitian

Penelitian ini menegaskan bahwa motivasi intrinsik pekerja informasi berperan krusial dalam membentuk layanan informasi yang inklusif bagi kelompok disabilitas rungu-wicara. Melalui pendekatan *Community-Based Research* (CBR), penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan program aksesibilitas informasi perlu dukungan formal dan partisipasi aktif serta refleksi personal para pekerja informasi dalam kegiatan kerjanya. Adapun dukungan formal dari lembaga merupakan sarana dalam menciptakan suasana kondusif ramah kelompok disabilitas. Hal tersebut berlaku baik didalam adaptasi produk informasi maupun bagaimana perlakuan terhadap kelompok disabilitas.

PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa motivasi intrinsik pekerja informasi berperan krusial dalam membentuk layanan informasi yang inklusif bagi kelompok disabilitas rungu-wicara. Melalui pendekatan *Community-Based Research* (CBR), penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan program aksesibilitas informasi bergantung pada kebijakan formal dan partisipasi aktif serta refleksi personal para pelaku di lapangan.

Konstruksi *Self-Determination Theory* (SDT) melalui indikator *autonomy*, *competence*, dan *relatedness* menjadi kunci untuk memahami perilaku pekerja informasi dalam konteks ini. Indikator *autonomy* mendorong kebebasan individu untuk berinovasi dan bertindak sesuai nilai-nilai kemanusiaan. Indikator *competence* memperkuat kapasitas profesional serta kesadaran sosial. Kemudian indikator *relatedness* menumbuhkan relasi empatik antara pekerja informasi dan komunitas disabilitas. Ketiganya saling terkait dalam menciptakan motivasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebermanfaatan sosial.

Penelitian ini memperluas penerapan SDT dalam konteks layanan publik dari perspektif teoritis. Temuan dan analisisnya memperkaya pendekatan CBR dengan bukti empiris yang menekankan kolaborasi sejajar antara peneliti dan komunitas. Dari sisi praktikal, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi agar lembaga informasi, regulator, dan organisasi profesi lebih banyak menyediakan ruang partisipasi dan pelatihan berbasis empati. Dukungan struktural yang mendorong kebebasan berinovasi, kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan kompetensi akan menjadi pondasi penting bagi terciptanya sistem informasi publik yang benar-benar inklusif dan berkeadilan.

Penegasan atas temuan dari penelitian ini bahwa inklusivitas dalam akses informasi adalah hasil dari kolaborasi antara kebijakan, kompetensi profesional, dan kesadaran moral individu. Upaya menuju ekosistem informasi yang adil dan setara bagi penyandang disabilitas menuntut transformasi yang bersifat multidimensional mulai dari perubahan paradigma, penguatan kapasitas, hingga pembentukan budaya empatik di dalam lembaga penyedia layanan informasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, atas dukungan dan pendanaan yang telah diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Rahmi selaku penulis kedua, atas kontribusi, kolaborasi, dan dedikasi yang berharga selama proses penyusunan dan penyelesaian penelitian ini.

KONTRIBUSI PENULIS

Penulisan artikel ini merupakan hasil kolaborasi antara Penulis 1 dan Penulis 2. Mulai dari perumusan ide dan pengembangan konsep penelitian, kemudian proses pengumpulan dan analisis data, serta melakukan penyusunan dan penyuntingan naskah akhir.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penelitian, hasil, maupun penulisan artikel ini.

PENDANAAN

Penelitian ini didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai sponsor utama. Adapun sponsor pendukung dalam keperluan penelitian ini didukung oleh PT. Kejar Prestasi dalam mengupayakan dukungan akomodasi publikasi dan penerbitan penelitian ini akan diterbitkan dan dikembangkan dalam bentuk naskah buku.

DAFTAR PUSTAKA

- Alzuguren, C. A. (2019). Self-determination, emotions and exclusion in a blog of deaf people: a qualitative perspective. Dalam *Rev Bras Enferm [Internet]* (Vol. 72, Nomor 4). www.signoblog.net
- Arianto, D., & Apsari, N. C. (2023). Gambaran Aksesibilitas, Inklusivitas, dan Hambatan Penyandang Disabilitas Dalam Memanfaatkan Transportasi Publik: Studi Literatur di Berbagai Negara. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(2), 156. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i2.42633>
- Azizah, S. N., & Rahmi. (2023). Academic librarian perceptions of facilities and services for persons with visual impairments. *Journal of Academic Librarianship*, 49(6). <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2023.102791>
- Bodaghi, N. B., Cheong, L. S., & Ngah, Z. A. (2019). Transition to campus life: The perceptions of visually impaired students towards librarians' communication skills. *LIBER Quarterly*, 29(1), 1–24. <https://doi.org/10.18352/lq.10279>
- Eide, A. H., Ofstad, D., Støylen, M., Hansen, E., & Høiseth, M. (2022). Participation and Inclusion of Children and Youth with Disabilities in Local Communities. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(19). <https://doi.org/10.3390/ijerph191911893>
- Lewis, N., Reynolds, E., Vale, M., Keenan, E., Hartland, A., Haines, M., & Davies, B. E. (2021). An evaluation of positive behavioural support implemented within an intensive community support service for people with learning disabilities who present with behaviours that challenge. *Journal of Intellectual Disabilities*, 25(3), 348–356. <https://doi.org/10.1177/1744629519890962>
- Listman, J. D., Kurz, K. B., Piccoli, A., & Craig, P. (2024). Inclusive Research Environments for Deaf and Hard of Hearing English Speakers. *CBE Life Sciences Education*, 23(2). <https://doi.org/10.1187/cbe.22-11-0235>
- Page, S. L., & Islam, M. R. (2015). The role of personality variables in predicting attitudes toward people with intellectual disability: An Australian perspective. *Journal of Intellectual Disability Research*, 59(8), 741–745. <https://doi.org/10.1111/jir.12180>
- Rosalina, R., & Setiyowati, N. (2023). *Stigma Penyandang Disabilitas dalam Bekerja di Indonesia: Literature Review Stigma of People with Disabilities in Working in Indonesia: Literature Review E M A I L*. 7. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.4669>
- Shkedy, G., Shkedy, D., Sandoval-Norton, A. H., Fantaroni, G., Montes Castro, J., Sahagun, N., & Christopher, D. (2021). Visual Communication Analysis (VCA): Implementing self-determination theory and research-based practices in special education classrooms. *Cogent Psychology*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311908.2021.1875549>
- Thomas, C., Flynn, S., Slayter, E., & Johnson, L. (2023). Disability, Intersectionality, Child Welfare and Child Protection: Research Representations. *Scandinavian Journal of Disability Research*, 25(1), 45–64. <https://doi.org/10.16993/sjdr.963>
- Tracy-Bronson, C. P. (2024). Leaders' Social and Disability Justice Drive to Cultivate Inclusive Schooling. *Education Sciences*, 14(4). <https://doi.org/10.3390/educsci14040424>
- Vera Nurfajriani, W., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., Afgani, W., Negeri, U. I., Fatah, R., & Abstract, P. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>

How to cite this article:

Kurniawan, A., & Rahmi. (2025). The Role of Information Workers' Self-Determination in Access to Information for the Hearing and Speech-Impaired. *JPUA: Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga: Media Informasi Dan Komunikasi Kepustakawanan*, 15(2), 81–91. <https://doi.org/10.20473/jpua.v15i2.2025.81-91>